

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA
TENGARA BARAT DALAM MENSUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2018**

**(Studi Kasus : Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018
Bangkesbangpoldagri Provinsi)**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Starata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Pada
Fakultas Ilmu Sosisal Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Oleh :

RAHMAD HIDAYAT
NIM 216130024

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2020/2021

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT DALAM MENSUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2018**

**(Studi Kasus : Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018
Bakesbangpoldagri Provinsi)**



**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi
Mataram, 29 Januari 2021

Dosen Pembimbing I

Lalu Sopan Tirta Kusuma S.IP., M.Si
NIDN. 0825038303

Dosen Pembimbing II

Hidayatullah S.IP., M.IP
NIDN. 0809038902

Mengetahui,
**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT DALAM MENSUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2018**

**(Studi Kasus : Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018
Bakesbangpoldagri Provinsi)**

Disusun dan diajukan Oleh

RAHMAD HIDAYAT
NIM. 216130024

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 29 Januari 2021 dan
dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

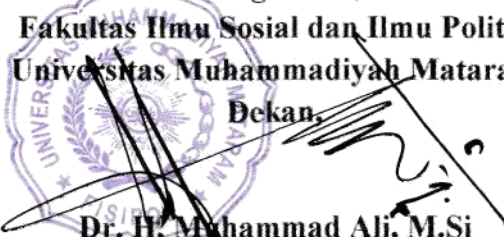
1. **Lalu Sopan Tirta Kusuma S.IP.,M.Si**
NIDN. 0825038303
2. **Hidayatullah S.IP.,M.IP**
NIDN. 0809038902
3. **Dedy Iswanto ST.,MM**
NIDN. 0818087901



Mengatahui,

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Dekan,



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Rahmad Hidayat

Nim : 216130024

Tempat dan Tanggal Lahir : Bantulanteh, 30 Mei 1995

Bahwa Skripsi dengan judul “*Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negri Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mensukseskan Pemilukada Tahun 2018*” adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti Skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (*plagiat*), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar keserjanaan saya.

Mataram, 28 Februari 2021

Penyusun,



Rahmad Hidayat

Nim: 216130024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAD HIDAYAT
NIM : 216130024
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 30-05-1995
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082 339 023 400
Judul Penelitian :-

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Nusa Tenggara Barat Dalam Mensukseskan Pemilihan
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 60% 63% 60% 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 1-3-2021

Penulis

METERAI
TEMPEL
31969AHF913620081
6000
ENAM RIBU RUPIAH
RAHMAD HIDAYAT
NIM. 216130024

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAD HIDAYAT
NIM : 216130024
Tempat/Tgl Lahir : Bantol, Jember 30-05-1995
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082339023400
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Badan Kebijakan Bahasa dan Politik Provinsi
Nusa Tenggara Barat dalam Mensejahterakan Pemilihan
Kebijakan Daerah Tahun 2018

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 1-3-2021

Penulis



RAHMAD HIDAYAT
NIM. 216130024

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Skandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

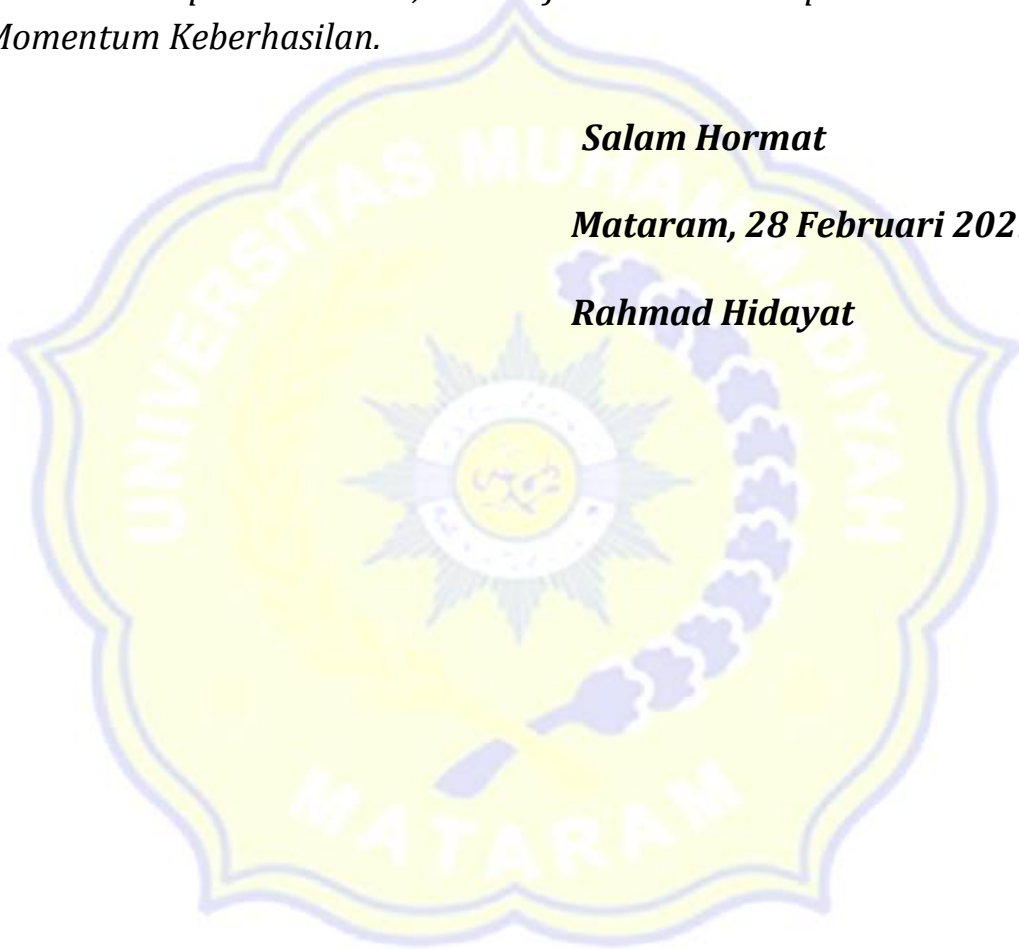
*Memulai dengan penuh Keyakinan,
Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.*

*Karena Hidup Untuk Mati, maka jadikanlah setiap Hari adalah
Momentum Keberhasilan.*

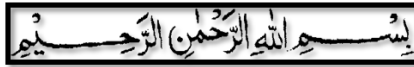
Salam Hormat

Mataram, 28 Februari 2021

Rahmad Hidayat



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbi Alalmin, puji syukur Penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmad dan karuniaNya sehingga penyusun sikripsi ini yang berjudul **“Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018”** dengan lancar dan tepat waktu.

Selsainya penyusunan sikripsi ini tidak lepas dari bantuan, support, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penyusun ingin sampaikan trimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.Ip., M.Ip selaku kaprodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma S.IP., M.Si selaku Dosen pembimbing Utama.
5. Bapak Hidayatullah,. S.IP., M.IP selaku dosen pembimbing kedua
6. Bapak dan Ibu Staf pengajar (dosen) dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

7. Untuk kedua orang tua saya H. Kamaruddin dan Jariah. Terimakasih atas segalaunya semoga tuhan meridohi apa yang telah kalian berikan dan perjuangan untuk saya.
8. Semua teman-teman studi pemerintahan Angkatan 2016 atas kerja samanya.

Dalam proses pembuatan skripsi ini Penyusun mengalami banyak kesulitan dalam menyusun beberapa point-point pembahasan didalamnya, namun dengan adanya sumber-sumber referensi yang Penyusun peroleh dari media sosial dan dari buku, peraturan perundang-undangan serta yang lainnya, kesulitan yang Penyusun hadapi bisa teratasi.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pihak yang membaca skripsi ini sangat Penyusun perlukan. Harapan Penyusun semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, Penyusun ucapkan terimakasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 28 Februari 2021

Penyusun,



Rahmad Hidayat

Nim: 216130024

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA
TENGARA BARAT DALAM MENSUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2018**

Rahmad Hidayat
216130024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan. Berdasarkan fenomena yang terjadi, pokok permasalahan yang akan menyusun teliti yaitu Bagaimana peran Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mensukseskan Pemilukada di NTB Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana peran Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mensukseskan Pemilukada di NTB Tahun 2018, (2) Faktor-faktor mempengaruhi Bakesbangpoldagri NTB dalam mensukseskan Pemilukada di NTB Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bakesbangpol Prov. NTB dalam mensukseskan Pilkada NTB Tahun 2018, diantaranya: Koordinasi dalam dalam rangka penyelenggaraan pilkada (TNI, atau Polri). Melakukan pemantuan pelaksanaan pilkada dan penyelesaian masalah pilkada kepada Gubernur. Menciptakan kondusipitas daerah pelaksanaan pilkada 2018 (pra, saat, dan pasca). Melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan pilkada secara berjenjang. Fasilitasi melalui dana hiba kepada badan penyelenggaraan pemilu (KPU dan Bawaslu), Sosialisasi pilkada dalam rangka membantu KPU. Faktor yang mensukseskan Pilkada NTB dengan menekan angka kasus Pilkada NTB 2018, Pemberian keyakinan dan Kepercayaan Politik seperti: Meningkatnya kenyamanan dan keamanan lingkungan sebagai hasil kegiatan dari Komunitas Intelijen Daerah (Kominda);. Sedangkan Faktor kendalah yaitu Terbatasnya anggaran yang tersedia di Baksebangpol hingga terbatas melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Bangkesbangpol NTB, dan Suksesi Pilkada 2018.

THE ROLE OF THE WEST NUSA TENGGARA PROVINCE'S NATIONAL UNITY AND POLITICAL AGENCY IN THE SUCCESSFUL ELECTION OF THE LOCAL HEAD IN 2018

Rahmad Hidayat
216130024

Faculty Of Social And Political Sciences, Muhammadiyah University Of Mataram

ABSTRACT

Elections are manifestation of one of democracy's characteristics: the people are directly involved in determining the country's direction and political policies for the next five years. The involvement of Bakesbangpoldagri in NTB Province in the success of the 2018 Regional Head Election In NTB. This study aims to determine (1) how Bakesbangpoldagri NTB Province influenced the success of the 2018 Regional Head of Regional Head Election in NTB, and (2) factors influencing the NTB Regional Head Election in NTB. A Descriptive methodology was used to perform this study, which employed qualitative research methods. The findings revealed the importance of Bakesbangpol Prov. NTB in the 2018 NTB Pilkada's performance, including coordination in the form of the Pilkada's planning (TNI or Polri). Monitor pilkada implementation and report any election-related issues to the governor. Creating regional cohesion in preparation for the regional elections in 2018 (pre, time, and post). Report on the difficulties and success of the pilkada's planning and implementation in phases. Grants to election organizing bodies to aid in the facilitation of election (KPU and Bawaslu). Socialization in the runUp to the election in order to help the KPU. Factors that contributed to the NTB pilkada's success in suppressing the number of cases in the 2018 NTB Pilkada, giving political faith and trust, and increasing environmental comfort and protection as a result of the regional intelligence Community's (kominda) activities; meanwhile, the regulation factor is Bakesbangpol's small budget, which restricts public socialization.

Keywords : *Role, Bakesbangpol NTB, and Pilkada Succession 2018.*



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISIME	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teori dan Konseptual	14
2.2.1 Kajian Teories	16
2.2.1.1 Teori Peran (<i>Grand Teori</i>)	16
2.2.1.2 Teori Partisipasi Politik (<i>Middle Teori</i>)	19
1. Teori Pilihan Rasional	19
2. Teori Strategi	20
2.2.2 Kajian Konseptual	22
2.2.2.1 Pengertian Peran	22

2.2.2.2 Kajian Umum Tentang Partisipasi Politik	24
1. Pengertian Partisipasi Politik.....	24
2. Jenis-jenis Partisipasi Politik	27
2.2.2.3 Kajian Umum Tentang Pemilihan Umum Kepala	
Daerah (Pemilukada).....	29
1. Pengertian Pemilu.....	29
2. Pengertian Pemilukada	34
2.2.2.4 Suksesi Program Kerja.....	40
1. Pengertian Suksesi Program Kerja	40
2. Suksesi Program Bangkesbanpoldagri NTB	43
2.2.2.5 Kajian Umum Tentang Bangkesbanpoldagri NTB ...	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1. Jenis Penelitian.....	50
3.2. Lokasi penelitian	52
3.3. Jenis dan Sumber Data	52
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5. Teknik Analisis Data.....	55
3.6. Tahap-Tahap Penelitian	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1. Gambaran Umum Bangkesbangpol NTB	59
4.1.1. Sejarah.....	59
4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	60
4.1.3. Susunan Organisasi	61
4.1.4. Rincian Tugas dan Fungsi dari masing-masing Jabatan	62
4.1.5. Visi dan Misi	77
4.1.6. Struktur Organisasi	78
4.2. Peran Bangkesbangpol NTB dalam mensukseskan Pilkada di	
NTB Tahun 2018	79
4.2.1. Kondisi Pemilu dan Pilkada	79
4.2.2. Peran Bangkesbangpoldagri dalam mensukseskan.....	
Pemilukada pada Tahun 2018.....	84

4.3. Faktor-faktor mempengaruhi Bakesbangpoldagri NTB dalam mensekseskan Pilkada di NTB Tahun 2018	95
4.3.1. Faktor -Faktor Yang Mensekseskan Pilkada di NTB ...	95
4.3.2. Faktor-faktor kendala bakesbangpol dalam	
mensekseskan Pilkada di NTB Tahun 2018	98
BAB V PENUTUP	99
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	13
-----------	----------------------------	----



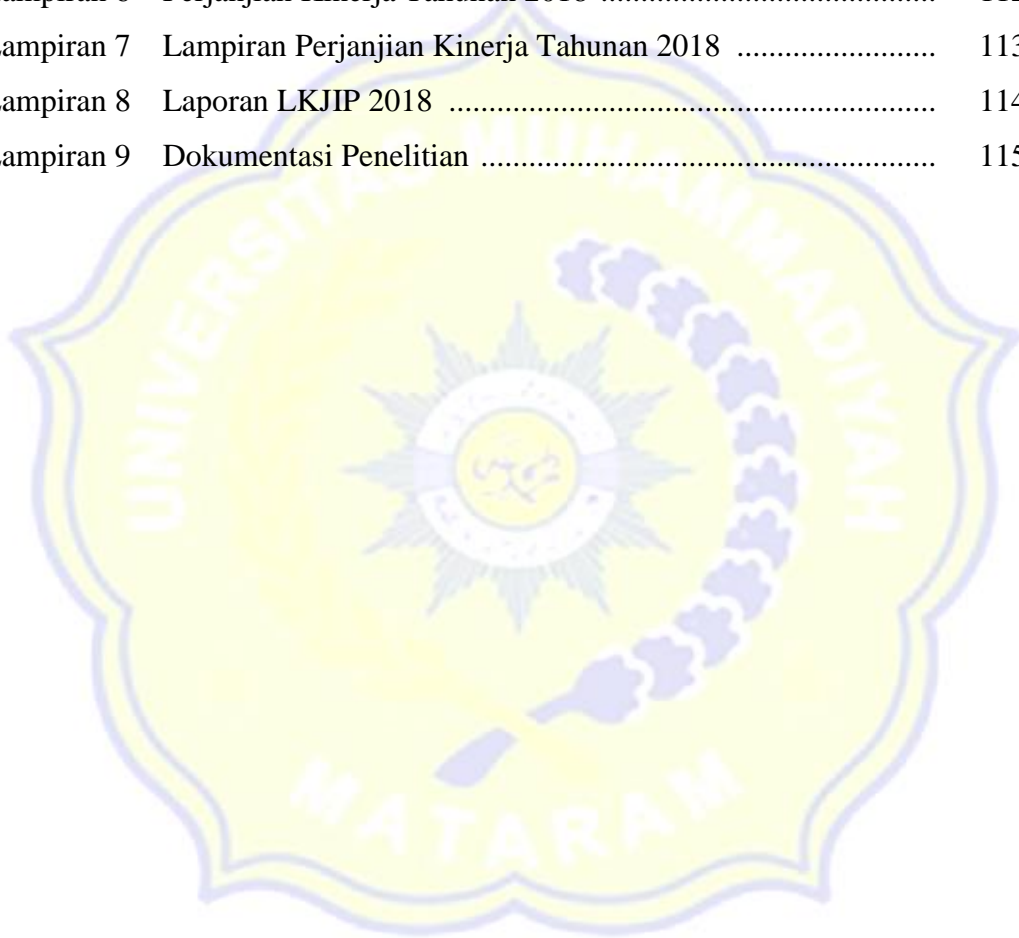
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB.....	49
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Berdasarkan Perda Prov. NTB No. 8..... Tahun 2008.....	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup	104
Lampiran 2	Surat Pengantar Izin Penelitian	105
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Penelitian	106
Lampiran 4	Kartu Bimbingan Skripsi	107
Lampiran 5	Rekapitulasi Data Konflik	111
Lampiran 6	Perjanjian Kinerja Tahunan 2018	112
Lampiran 7	Lampiran Perjanjian Kinerja Tahunan 2018	113
Lampiran 8	Laporan LKJIP 2018	114
Lampiran 9	Dokumentasi Penelitian	115



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali yang dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 1 bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Prihatmoko (2003:19) Pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni: a. sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*). b. pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. c. pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Adanya pemilu maka menunjukkan bahwa kita telah melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya pemilu maka dapat melaksanakan pergantian pemerintah

secara aman, damai dan tertib. serta harus bisa berkomitmen untuk memilih calon pemimpin tanpa adanya niatan akan golput.

Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan. Pada saat ini, pemilu secara nasional dilakukan dua kali yaitu pemilihan anggota legislatif (Pileg), yang merupakan rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif, baik anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Di samping itu, diselenggarakan pula pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat sesudah pemilihan anggota legislatif dilaksanakan. Selain itu terdapat pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang dilakukan di daerah-daerah yang ada di provinsi masing-masing daerah. (Prihatmoko, 2003:20)

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrument yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.

Pemilukada adalah proses pemilihan gubernur, bupati, serta walikota secara langsung oleh rakyat, yang dilakukan secara bersamaan bagi semua kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun yang sama. Jadi setiap daerah tidak lagi sendiri-sendiri mengadakan pemilihan kepala daerahnya.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, KPUD memperbolehkan calon independen untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Kepala Daerah. Calon independen juga sama artinya dengan calon perseorangan, hanya saja calon perseorangan menggunakan frasa yuridis normatif, sementara calon independen adalah frasa yang lebih umum, dan merupakan suatu aspirasi yang lahir dari masyarakat. Posisi calon independen, dalam pemilukada merupakan suatu bentuk mengapresiasi hak-hak politik bagi setiap warga masyarakat, yang ingin menjadi pemimpin, namun terbatas tidak adanya dukungan politik dari partai-partai politik.

Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab dan menciptakan politik yang cerdas dan berintegritas. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik mengamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan peran para tokoh sangat besar, para tokoh merupakan penggerak sekaligus pendorong kepada masyarakatnya untuk mengenal proses pemilu yang cerdas dan berintegritas dan memberikan pemahaman yang baik dan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mewujudkan pemilih yang cerdas. Dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Kesemua hal tersebut merupakan tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri). Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB adalah salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Didalam Pasal 85 Pergub NTB Tahun 2018 menegaskan bahwa Bakesbangpoldagri memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Adapun salah satu fungsinya pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam Negeri. Selanjutnya dasar hukum yang menyatakan bahwa salah satu peran Bakesbangpol untuk mensukseskan pemilu dan Pemilukada yang tertuang dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 yang mengatur tentang pengembangan politik dan fasilitas organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan di bidang kepemiluan dan pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik.

. Terciptanya kondisi daerah yang aman, tentram, harmonis, dan damai merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaran urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Bagaimana kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB tahun 2018 dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik merupakan salah satu sasaran strategis yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar persentase masyarakat NTB menggunakan hak pilihnya/hak politiknya dalam

berdemokrasi. Partisipasi masyarakat dalam politik ini akan dapat dilakukan pengukuran apabila terdapat penyelenggaraan pemilu (Pileg, Pilpres, Pilgub, dan pilbup/walikota) pada tahun yang bersangkutan. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik ditetapkan satu indikator yaitu “Tingkat Partisipasi Masyarakat “. (Bakesbangpoldagri NTB, 2018)

Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik merupakan salah satu indikator utama Bakesbangpoldagri 2013-2018 dan menjadi acuan pemerintah daerah yang pertama periode 2013-2018. Terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam politik pada tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan atau progress capaian sebesar 102,91%. Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik pada tahun 2018 ini diukur pada penyelenggaraan Pilkada serentak yaitu Pilbup/Pilwal di tiga Kabupaten/Kota (Lombok Timur, Lombok Barat dan Kota Bima) serta Pemilihan Gubernur Periode 2018 – 2023. Capaian angka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilukada di daerah kabupaten di NTB lebih tinggi dari target Provinsi tahun 2018

Dalam melaksanakan peran Bakesbangpoldagri Provinsi NTB yang merupakan salah satu OPD yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dan sebagai mata dan telinganya pemerintah memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mempertahankan kondusifitas daerah guna keberlangsungan pembangunan disegala sektor. Meskipun sampai dengan periode akhir Renstra 2013 – 2018

sebagian besar dari target indikator kinerja dapat dicapai, namun tidak berarti lepas dari berbagai kendala atau permasalahan. Kendala yang cukup dirasakan adalah masih minimnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Bakesbangpoldagri Provinsi NTB baik dari secara kuantitas maupun kualitas.

Eksistensi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terlihat dari berbagai progress sosialisasi yang dilaksanakannya seperti konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi di Provinsi NTB dari tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 terdapat 161 kasus menjadi 97 kasus pada tahun 2011, demikian juga pada tahun 2012 turun menjadi 93 kasus dan pada tahun 2013 turun menjadi 57 kasus. (Bakesbangpoldagri NTB, 2018)

Oleh karena itu harus di tunjang dengan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai. Mengingat keterbatasan anggaran yang dikelola untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, maka dalam menjawab permasalahan seperti tersebut di atas Bakesbangpoldagri Provinsi NTB intensif berkoordinasi dan bersinergi dengan pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Intelejen Negara (BIN) agar mengikut sertakan Aparat dari Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam setiap kegiatan diklat keintelejenan. Demikian juga halnya untuk peningkatan kapasitas di bidang yang lain, seperti administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan kesekretariatan pada umumnya, Bakesbangpoldagri Provinsi NTB

berkolaborasi dan berkoordinasi dengan OPD yang punya tupoksi terkait agar memprogramkan diklat kompetensi seperti dimaksud.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran bakesbangpol NTB dalam pemilukada di NTB yang berjudul **“Peran Bakesbangpoldagri Dalam Mensukseskan Pemilukada Di NTB Tahun 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Bakesbangpol Provinsi NTB dalam mensukseskan Pemilukada di NTB Tahun 2018 ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan Bakesbangpol NTB dalam mensukseskan Pemilukada di NTB Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran Bakesbangpol Provinsi NTB dalam mensukseskan Pemilukada di NTB Tahun 2018.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Bakesbangpol NTB dalam mensukseskan Pemilukada di NTB Tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis

Diharapkan mampu memberikan suatu pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti-peneliti baru agar menjadi bahan referensi bacaan dalam pengembangan sistem informasi.

b. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya tentang peran Bakesbangpol NTB dalam mensukseskan pemilu.

c. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ada beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menjadi jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.
- 2) Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap bagaimana peran Bakesbangpol NTB dalam mensukseskan Pemilu di Provinsi NTB pada tahun 2018.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti meneliti dan menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku, jurnal maupun skripsi dalam rangka mendapat teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Marta Banang yang berbentuk Jurnal pada tahun (2015) yang berjudul Koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2015 Di kabupaten Mahakam Ulu, dengan hasil penelitian dan pembahasan bahwa kantor KESBANGPOL bertujuan mensukseskan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Mahakam Ulu yang sekaligus merupakan Pilkada yang pertama kali dilaksanakan sejak terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan diadakannya Pilkada serentak tahun 2015, maka Kabupaten Mahakam Ulu terbantu dalam mensosialisasikan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada. Seluruh tahapan tersebut berlaku sama di setiap daerah di Indonesia, sehingga

kesadaran berpolitik masyarakat menjadi lebih tinggi karena gencarnya pemberitaan oleh media tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2015 sangat tinggi sebab hampir seluruh media massa memberitakan mengenai kegiatan tersebut. Pilkada serentak tahun 2015 merupakan suatu terobosan pemerintah dibidang politik yang disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adapun persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai peran kesbangpol sangatlah membantu dalam pelaksanaan pemilukada. Sedangkan perbedaannya dengan peneliti yaitu lebih kepada koordinasi kantor kesbangpol dengan komisi pemilihan umum (KPU) dalam pelaksanaan pemilukada yang lebih fokus pada peran kesbangpol dalam mensukseskan pemilukada.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nota Vianta Sembiring yang berbentuk Skripsi pada tahun (2016) yang berjudul Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Adapun hasil penelitian dan pembahasan bahwa landasan program kerja pengembangan wawasan kebangsaan adalah visi misi, tupoksi, dan peraturan pemerintah, dalam implementasi program kerja wawasan kebangsaan, maka ada 15 program kerja dengan total 53 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Pendekatan yang paling sering digunakan adalah sosialisasi dan forum diskusi, serta yang paling jarang pendekatan pelatihan, kemudian metode penyampaian yang paling sering adalah dengan metode pendidikan.

Adapun persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan Program Kerja Badan Kesbangpol. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu meneliti mengenai kordinasi Linmas Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan sedang peneliti meneliti mengenai koordinasi dan peran bangkesbanpol di bidang Pemilukada.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Julyara Azfina yang berbentuk Skripsi pada tahun (2016) yang berjudul Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pemberdayaan Nasionalisme Pemuda Kepulauan Riau. Adapun hasil penelitian dan pembahasan bahwa peran pemberdayaan nasionalisme pemuda oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sudah cukup optimal dan lebih mengfokuskan bagaimana peran Badan Kesbangpol terhadap pemberdayaan nasionalisme pemuda yang berkelanjutan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemuda di daerah tersebut dan seberapa baik peran Badan Kesbangpol dalam pemberdayaan nasionalisme pemuda di Kepulauan Riau sebagai bahan evaluasi kinerja kedepannya.

Adapun persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan Peran Badan Kesbangpoldagri. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu meneltii mengenai Pemberdayaan Nasionalisme Pemuda Kepulauan Riau. sedang peneliti meneliti mengenai koordinasi dan peran bangkesbanpoldagri di bidang Pemilukada.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul/Tahun	Hasil
1	Marta Banang (2015)	<i>Koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2015 Di kabupaten Mahakam Ulu</i>	Kantor KESBANGPOL bertujuan mensukseskan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Mahakam Ulu yang sekaligus merupakan Pilkada yang pertama kali dilaksanakan sejak terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan diadakannya Pilkada serentak tahun 2015, maka Kabupaten Mahakam Ulu terbantu dalam mensosialisasikan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada. Seluruh tahapan tersebut berlaku sama di setiap daerah di Indonesia, sehingga kesadaran berpolitik masyarakat menjadi lebih tinggi karena gencarnya pemberitaan oleh media Tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2015 sangat tinggi sebab hampir

			seluruh media massa memberitakan mengenai kegiatan tersebut. Pilkada serentak tahun 2015 merupakan suatu terobosan pemerintah dibidang politik yang disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat
2	Nota Vianta Sembiring (2016)	<i>Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.</i>	landasan program kerja pengembangan wawasan kebangsaan adalah visi misi, tupoksi, dan peraturan pemerintah, dalam implementasi program kerja wawasan kebangsaan, maka ada 15 program kerja dengan total 53 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Pendekatan yang paling sering digunakan adalah sosialisasi dan forum diskusi, serta yang paling jarang pendekatan pelatihan, kemudian metode penyampaian yang paling sering adalah dengan metode pendidikan.
3	Julyara	<i>Peran Badan Kesatuan</i>	Adapun hasil penelitian

	Azfina	<i>Bangsa Dan Politik Dalam Pemberdayaan Nasionalisme Pemuda Kepulauan Riau.</i>	dan pembahasan bahwa peran pemberdayaan nasionalisme pemuda oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sudah cukup optimal dan lebih mengfokuskan bagaimana peran Badan Kesbangpol terhadap pemberdayaan nasionalisme pemuda yang berkelanjutan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemuda di daerah tersebut dan seberapa baik peran Badan Kesbangpol dalam pemberdayaan nasionalisme pemuda di Kepulauan Riau sebagai bahan evaluasi kinerja kedepannya.
--	--------	--	--

2.2. Kajian Teori dan Konseptual

Dalam sub bab ini akan dideskripsikan tentang variabel yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu meliputi peran, Bankesbangpol, dan pemilukada. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis permasalahan dalam rumusan masalah ini yaitu Teori Peran sebagai *Grand Theory* dan Teori Partisipasi Politik diantaranya Teori Pilihan Rasional dan Teori Strategi sebagai *Midle Theory*. Sedangkan Kajian Konseptual dalam penelitian ini yaitu

Pengertian Peran, Kajian Umum Tentang Partisipasi Politik, Kajian Umum Tentang Pengertian Pemilu dan Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Sukses Program, dan Kajian Umum tentang Bakesbangpol.

Adapun uraian selengkapnya tentang beberapa variabel yang terdapat dalam kajian pustaka, sebagai berikut :

2.2.1 Kajian Teoritias

2.2.1.1 Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi (Sarlito Wirawan Sarwono, 2015;215).

Menurut Khantz dan Kahn dalam Soerjono Soekonto, bahwa setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, normadan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhiperannya. Model inididasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapatdiprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisisosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat

mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat.

peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987 : 220).

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berwujud tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memegang suatu posisi dalam situasi sosial. Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerjadan masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang merekamainkan.

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang

yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Adapun teori yang digunakan oleh peneliti sebagai *Grand theory* yang mendukung penelitian ini untuk menjawab Rumusan masalah pertama adalah *Role theory* (teori peran) yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku Sosiologi sebagai pengantar dan dan Soerjono Soekanto.

Dengan demikian, kaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti secara umum, dimana peneliti akan melihat sejauhmana peran dari Bangkesbanpoldagri dalam pengembangan politik dan fasilitas organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan di bidang kepemiluan dan pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik terkhusus berpean dalam mensukseskan pemilu dan Pemilukada di NTB. Untuk melihat peran dari Bangkesbanpoldagri, Berdasarkan teori peran ini dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan didalam status tertentu dimanapun dia berada dan

mengikuti kaedah-kaedah atau peraturan tertentu, baik itu nilai moral maupun lainnya.

2.2.1.2 Teori Partisipasi Politik

1. Teori Pilihan Rasional

Lisa Retnasari: 2013, Dikemukakan oleh James S. Coleman (dalam George Ritzer: 2007;394) Teori rasional tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwatindakan seseorang mengarah jelas pada tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, Struktur-Struktur Kepribadian+ Keyakinan Politik + Tindakan Politik Individu+ Struktur dan proses politik secara holistic = Tingkah Laku yaitu aktor dan sumberdaya. Sumberdaya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Teori rasional memusatkan pada aktor. Menurut George Ritzer (2007:394) aktor dipandang sebagai manusia yang memiliki tujuan atau maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan pada upaya untuk mencapai tujuan, selain itu aktor juga mempunyai nilai dan pilihan.

Teori ini tidak memandang apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi pilihan sumber aktor. Hal yang penting adalah aktor melakukan tindakan yang sesuai tujuan. Menurut Cholisin (2007-155) pilihan rasional adalah kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan,

tetapi juga perbedaan alternative berupa pilihan yang ada. Apabila teori rasional ini dikaitkan dengan pemilih pemula, maka penyandang disabilitas sebagai aktor dalam pilwako mempunyai tujuan tertentu dengan tidak berpartisipasi (golput). Tujuannya bermacam-macam sikap masa bodoh, lebih mementingkan kepentingan pribadi, sebagai reaksi protes terhadap pemerintah atau calon kandidat tidak sesuai dengan pilihannya

2. Teori Strategi

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan struktur baru dalam Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi, atau desentralisasi. Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam

menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita.

Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau yang selama ini diabaikan oleh lawan. Citra yang diinginkan antara lain: dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah dan satuan eksekutif terutama sekali terletak dibidang kehumasan, target image menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, dan semua tindakan kehumasan hanya bertujuan untuk menyebarkan citra ini dan menanamkan dalam benak kelompok sasaran-sasaran. Citra yang diinginkan terkait pilihan tema, gaya, cara konforntasi dan tawaran sumber daya manusia.

Menurut Ramlan Surbakti (1992: 103) Perumusan strategi menjelaskan bagaimana partai merumuskan tentang konsep kemenangan yang akan dilakukan, ataupun ide-ide dasar partai dalam meraih simpati masyarakat, termasuk memetakan hal-hal yang dilakukan oleh lawan politiknya. Maka langkah awalnya partai politik harus merumuskan argument yang populis, dengan melihat wacana yang superior di tengah tengah masyarakat yang kemudian menjadi komoditas partai dan akan di lempar kepada konstituen. Fokus terhadap suatu wacana yang populis amat diperlukan, sehingga menjadi pusat kekuatan. perumusan strategi secara menyeluruh juga mencakup variasi-variasi strategi yang dilakukan partai politik,

sehingga gambaran dari satu tindakan dapat diduga, bahkan bagaimana efektifitas suatu strategi dapat diukur agar mampu mengejutkan lawan.(sumber:[http://repository.usu.ac.id_strategi partai politik memenangkan pemilu](http://repository.usu.ac.id_strategi_partai_politik_memenangkan_pemilu), diakses tanggal 28 Maret 2018, pukul 12:23 wib).

2.2.2 Kajian Konseptual

2.2.2.1 Pengertian Peran

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor

lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*). (Edy Suhardono, 1994;3)

Selanjutnya, pengertian Selanjutnya, istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekamto).

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada

perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupertindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badanlembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasisosial.

2.2.2.2 Kajian Umum Tentang Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya.

Suatu realitas, bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan anggota masyarakat acapkali harus berbenturan dengan kepentingan dan kebijaksanaan Negara. Benturan ini boleh jadi mencakup segala kepentingan seluruh anggota masyarakat, termasuk pula keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik.

(Arifin Rahman, 2002;128)

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Hoofsteede (1971) yang dikutip oleh

Khairudin (2000) mendefinisikan partisipasi sebagai “*The taking part in one or more phases of the process*” atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Sedangkan menurut Fithriadi, dkk. (1937) Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut. (Arifin Rahman, *Ibid*, 2002;128 & 183)

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah suatu proses pengambil bagian dalam suatu tahapan atau kegiatan tertentu.

Istilah partisipasi politik diterapkan kepada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik; pemilih (pemberi suara) berpartisipasi dengan memberikan suaranya; menteri luar negeri berpartisipasi dalam menetapkan kebijaksanaan luar negeri. Kadang-kadang istilah tersebut lebih diterapkan pada orientasi politik daripada aktivitas politik; warga Negara berpartisipasi dengan menaruh minat dalam politik. (Arifin Rahman, *Ibid*, 2002,;129) Analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang.

Samuel P. Huntington dan John Nelson, (1994;1), Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Di dalam masyarakat tradisional, pemerintahan dan politik biasanya hanya

merupakan urusan satu golongan elit yang kecil. Istilah “partisipasi politik” telah digunakan dalam pelbagai arti. Apakah partisipasi politik itu hanya perilaku, atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi-persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi (umpanya: informasi politik, persepsi seseorang tentang relevansi politik bagi urusannya sendiri, suatu keyakinan bahwa orang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah)?.

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya. (Miriam Budiardjo, 2008;367)

Melihat pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan, terdapat berbagai perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dalam bidang politik, tentunya masing-masing individu memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda-

beda dalam memandang kehidupan politik serta turut berperan dalam urusan-urusan politik.

2. Jenis-jenis Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat terwujud dalam pelbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku sebagai berikut :

- a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam proses pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lain, termasuk kegiatan membedakannya dari jenis-jenis partisipasi lain, termasuk kegiatan kampanye lainnya. Namun demikian, ada suatu kumpulan kegiatan-kegiatan yang berkaitan satu sama lain yang difokuskan sekitar siklus pemilihan dan pemungutan suara dan dengan jelas dapat dibedakan dari bentuk-bentuk utama lainnya dari tindakan politik.
- b. *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e. Tindak kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. (Samuel P. Huntington dan John Nelson, *Op., Cit*, 1994;16-18)

Rousseau menyatakan bahwa “Hanya melalui partisipasi seluruh warga negara dalam kehidupan politik secara langsung dan berkelanjutan negara dapat terikat ke dalam tujuan kebaikan sebagai kehendak bersama.”

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam sistem Pemilu. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, perhitungan cepat hasil pemilu (*quick count*), dengan ketentuan:

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara laus
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. (Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu*, Op. Cit, 2009263-264)

Berbagai bentuk partisipasi politik tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga negara yang mencakup antara lain:

- a. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara.
- b. Lahirnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi masukan terhadap kebijakan pemerintah.
- c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih, misalnya kampanye menjadi

pemilih aktif, menjadi anggota DPR, menjadi calon presiden yang dipilih langsung dan sebagainya.

- d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya melalui unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi, dan sebagainya

2.2.2.3 Kajian Umum Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum atau yang disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di daerah, serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam selembar kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. (Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2004:29) Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Selanjutnya, mengenai Hak Pilih dalam Pemilu, pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

- a. Hak pilih aktif (hak memilih)
- b. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih. (Rozali Abdullah, 2009;168).

Lanjutnya, seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan :

- a. Tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik.

Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ DPT ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
- b. Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.
- c. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). (Rozali Abdullah, *Ibid*, 2009;168).

Adapun Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggungjawab.⁵Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran kampanye ini ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota meliputi visi, misi Partai Politik masing-masing. (Rozali Abdullah, *Ibid*, 2009;168-200).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

Selanjutnya, mengenai pemilihan Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota, selanjutnya disebut pemilihan, adalah

pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 adalah pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Dan juga selain yang berusia paling rendah tujuh belas tahun yaitu anggota TNI, POLRI inipun telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 didalam Pasal 28 ayat 1, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Pemilihan umum kepala daerah Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 27 juni 2018.”

Bagi sebuah negara yang mengakui kedaulatan rakyat, Pemilu (pemilihan umum), Pilkada (pemilihan kepala daerah) atau Pilgub (pemilihan gubernur dan wakil gubernur) merupakan proses politik yang menjadi tanggung jawab rakyat secara menyeluruh untuk dapat berpartisipasi menyukseskan. Keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu merupakan indikator pendewasaan sikap politik rakyat dalam menentukan arah dan masa depan pembangunan negara dan bangsa indonesia. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu pada

kenyataanya tidak semata-mata menunjukkan tingkat demokrasi yang tinggi, karena munculnya fenomena partisipasi yang dimobilisasi.

2. Pengertian Pemilukada

Kecenderungan demokratisasi pada suatu negara dan masyarakat ditentukan oleh faktor lingkungan yang biasanya menentukan prinsip, sistem dan proses pemilu yang berawal dari perkembangan atau perubahan masyarakat. Perubahan alami masyarakat sebagai produk dari unsur-unsur dampak positif dan negatif pembangunan yang tampaknya sangat menentukan kecenderungan demokratisasi masyarakat, (Arbi Sanit, 1997). Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. (Yusdianto, 2010; 44). Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara. (Yusdianto, *Ibid*).

Wahyu Nugroho, (2016;483) menurutnya bahwa Pemilukada sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan demokrasi dalam pemerintahan daerah, seyogyanya juga semakin mencerminkan proses

kematangan berdemokrasi. Walaupun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra pemilu dan pilkada itu sendiri, seperti *money politics*, ketidaknetralan aparatur penyelenggara, kecurangan berupa pelanggaran kampanye dan pengelembungan suara, serta penyampaian pesan-pesan politik yang bernuansa sektarian berujung kepada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat. Setidaknya pilkada bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif serta derajat keterwakilan antara masyarakat dan kepala daerahnya juga diharapkan dapat meningkat. Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, Pilkada langsung harus menjadi pilar yang memperkuat bangunan demokrasi secara nasional. (Okberita.com, 2018 di Unggah 10 Agustus pukul 23.20 Wib). Terlaksananya Pilkada langsung menunjukkan adanya peningkatan demokrasi karena rakyat secara individu dan kelompok terlibat dalam proses melahirkan pemerintah daerah atau pejabat negara. Pilkada yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai demokrasi lokal adalah upaya untuk mewujudkan *local accountability*, *political equity*, dan *local responsiveness*, yang merupakan tujuan dari desentralisasi. (Okberita.com, *Ibid*).

Dari sisi kedaulatan rakyat daerah, demokrasi lokal dibangun untuk memberikan porsi yang seharusnya diperoleh rakyat lokal dalam pemberian legitimasi pada elit eksekutifnya. Selama ini rakyat daerah

memberikan kedaulatan hanya pada legislatif daerah saja melalui pemilu legislatif. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan. Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang).

Pemilihan Kepala Daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau kabupaten kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara teknis pelaksanaan Pilkada dibagi menjadi dua tahap kegiatan, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrument yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara. (Yusdianto, 2010, 44)

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal.

Pertama, sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih

banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (*oligarkis*).

Kedua, dari sisi kompetensi politik. Pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompotensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “*syndrome*” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak *fair*, seperti; praktik politik uang (*money politics*).

Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di aras lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. *Keempat*, pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan *legitimate*. Karena, melalui pemilukada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai

sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat.

Kelima, kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balance*) di daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik. (Suharizal, 2012, 8-9).

Pilkada juga merupakan terobosan baru dalam sistem politik Indonesia, khususnya untuk level pemerintahan lokal. Sebelum Pilkada, kepala daerah dipilih melalui sebuah proses politik yang tidak dapat disebut Pemilu, karena tidak melibatkan rakyat pemilih. Menurut Zuhro, dkk (2009:48) mengatakan bahwa Pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif.

Menurut Irtanto (2008:159) yang dimaksud Pilkada adalah suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung. Terselenggaranya Pilkada merupakan amanat pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan landasan hukum diatas, Pilkada merupakan

kegiatan pemilihan umum yang bertujuan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk daerah otonom tertentu, yang diharapkan mampu mewujudkan sistem politik yang lebih stabil dan berkualitas, karena terjadi proses pendewasaan pemilih, partai politik, penyelenggara dan media massa. Lebih lanjut Sanit (1985: 157) mengatakan proses pelaksanaan Pemilu berpengaruh langsung kepada pembentukan budaya politik, sebab tingkah laku para kontestan dan penyelenggara Pemilu langsung dihayati oleh anggota masyarakat yang mengetahuinya, baik pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan, maupun melalui informasi. Selanjutnya sistem ini mengatur beberapa hal berikut ini yaitu jurus pencalonan kandidat, jurus pencoblosan suara, besar/bobot daerah pemilihan, lingkup daerah pemilihan dan jurus pengambilan keputusan.

Oleh karena itu Pilkada sebagai salah satu proses demokrasi yang ada dalam sistem politik Indonesia, memiliki signifikansi yang tinggi dalam pembangunan politik Indonesia di masa mendatang serta dalam menciptakan keseimbangan antara politik lokal dan pusat, dapat memperkuat otonomi daerah dalam prinsip negara kesatuan.

2.2.2.4 Suksesi Program Kerja

1. Suksesi Program Kerja

Suksesi Program terdiri tiga kata yaitu Suksesi, Program dan Kerja. Suksesi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penggantian (terutama di lingkungan pimpinan tertinggi negara)

karena pewarisan; dan proses pergantian kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Spurr (1964) menyatakan bahwa suksesi merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus yang ditandai oleh perubahan vegetasi, tanah dan iklim mikro dimana proses ini terjadi. Selanjutnya Emlen (1973) menyatakan bahwa suksesi merupakan suatu proses dimana suatu masyarakat tumbuhan mencapai suatu keseimbangan dengan melalui tingkat vegetasi dimana masing-masing tingkat diduduki oleh spesies dominan yang berbeda.

Sedangkan didalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia program berarti rancangan mengenai asas-asas, serta dengan usaha-usaha dalam ketatanegaraan dan kerja adalah perbuatan melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan program kerja adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan aturan tertentu dan sistematis untuk suatu pekerjaan. Menurut Charles O. Jones (dalam Shalfiah:2013:7) pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.

- c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program kerja menurut penyusun merupakan serangkaian kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang memiliki standar operasional procedural dalam organisasi tersebut yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama baik terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut. Sedangkan program adalah unsur pertama yang harus ada dalam organisasi demi terwujudnya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek dan indicator yang jelas dalam setiap program mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
- b. Perkiraan kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Aturan dasar dalam berorganisasi yang harus dipegang dan dipatuhi oleh setiap anggotanya.
- d. Perencanaan anggaran
- e. Strategi pelaksanaan.
- f. Perkiraan-perkiraan dengan segala kemungkinan terbesar yang dapat mengancam keberlangsungan dari organisasi tersebut
- g. Memiliki target dan output tersendiri dari organisasi tersebut

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir, terstruktur dan lebih mudah untuk dioperationalkan. Hal ini mengarah kepada pengertian program yang diuraikan sebelumnya.

Suatu program ialah kumpulan usaha kerja yang saling berhubungan yang telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan terintegrasi dengan tujuan organisasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

2. Suksesi Program Bangkesbanpodagri NTB

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggungjawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab dan menciptakan politik yang cerdas dan berintegritas.

Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab dan menciptakan politik yang cerdas dan berintegritas.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan

kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan peran para tokoh sangat besar, para tokoh merupakan penggerak sekaligus pendorong kepada masyarakatnya untuk pengenalan proses pemilu yang cerdas dan beintegritas dan memberikan pemahaman yang baik dan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mewujudkan pemilihan yang cerdas.

Adapun kegiatan yang pernah dilakukan oleh Bangkesbanpoldagri NTB yaitu Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pilkada/Pilpres/Pileg Kepada Toko Ormas/Orpol dengan tema ” Membangun Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Pesta Demokrasi yang Damai, Santun dan Berintegritas” dan ”Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Cerdas Dan Berintegritas”.

Dengan maksud memberikan pemahaman kepada para Tokoh Ormas/Orpol tentang hak dan kewajiban dalam berpolitik, sehingga diharapkan para peserta dapat lebih berperan secara aktif dan sebagai motivator penggerak di wilayahnya masing-masing. Memberikan pemahaman dan menanamkan semangat kebangsaan kepada para Tokoh Ormas/Orpol. Meningkatkan peran dan partisipasi para pemilih dalam berpolitik yang cerdas dan berintegritas. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

institusi. Selanjutnya bertujuan meningkatkan pengetahuan para Tokoh Orpol/Ormas dalam berpolitik yang cerdas dan berintegritas dan meningkatkan peran dan partisipasi para Tokoh Ormas/Orpol dalam berpolitik untuk memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2.5 Kajian Umum Tentang Bakesbangpol

Badan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Upaya pembangunan oleh Bakesbangpoldagri Provinsi NTB telah menunjukkan hasil yang positif antara lain meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik, terciptanya stabilitas politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (kamtrantibmas) secara simultan. Tentu pencapaian ini tidak terlepas dari peran semua pihak baik pemerintah maupun seluruh komponen masyarakat sebagai hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB (Review Renstra Bakesbangpoldagri NTB 2013-2018).

Dengan adanya kewenangan menjalankan dan tugas sebagai tanggung jawab, Bakesbangpoldagri Provinsi NTB senantiasa melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memfasilitasi terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif hingga memungkinkan seluruh elemen masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara

baik. Oleh karena itu, tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dapat dikemukakan sebagai berikut (Review Renstra Bankesbangpoldagri NTB 2013-2018) :

- a. Makin eksisnya kehidupan kolektif masyarakat warga dalam perbedaan, yang ditandai dengan menurunnya angka kejadian konflik, perkelahian antar kampung, antar golongan dan antar warga masyarakat.
- b. Makin menurunnya intensitas gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan makin kurangnya tindakan anarkis dan premanisme yang meresahkan.
- c. Makin terbangunnya suasana saling melindungi diantara warga masyarakat baik dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam maupun bencana non alam seperti terorisme, radikalisme, dsb.

Eksistensi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terlihat dari konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi di Provinsi NTB dari tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 terdapat 161 kasus menjadi 97 kasus pada tahun 2011, demikian juga pada tahun 2012 turun menjadi 93 kasus dan pada tahun 2013 turun menjadi 57 kasus.

Adapun keberhasilan dalam menekan angka kasus yang terjadi tidak terlepas dari kondisi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kenyamanan dan keamanan lingkungan sebagai hasil kegiatan dari Komunitas Intelijen Daerah (Kominda);
- b. Meningkatkan kemampuan anggota jejaring Kominda kabupaten/kota melakukan deteksi dini dan cegah dini dalam pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal serta penanganan konflik;
- c. Terciptanya stabilitas daerah yang kondusif melalui kegiatan sbb :
 - 1) Rakor stabilitas Polkam menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
 - 2) Rakor penanganan konflik.
 - 3) Rapat Kominda.
 - 4) Rapat pengkajian masalah strategis di kab/kota se NTB melalui kegiatan temu bina pencegahan konflik bagi kalangan mahasiswa/pemuda/ ormas/toma tahun 2013;
 - 5) Penguatan kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui kegiatan fasilitasi pembentukan kelembagaan tingkat kabupaten, kecamatan dan lurah/desa, rapat kerja FKDM dan Lokakarya Survei jenis dan sumber konflik se Nusa Tenggara Barat;
 - 6) Rapat koordinasi antisipasi Gerakan Radikal dan Terorisme di Wilayah NTB.
 - 7) Penguatan peran FKUB dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat beragama melalui rapat koordinasi anggota FKUB Provinsi NTB;
 - 8) Penguatan peran FPK melalui rapat koordinasi serta kegiatan fasilitasi pembentukan kelembagaan tingkat Kab./Kota se Provinsi NTB;
 - 9) Pembentukan Tim terpadu dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Keamanan Dalam Negeri;

Untuk lebih memantapkan kiprah Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sebagai SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membangun keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka dilakukan Review Renstra Tahun 2013-2018. Review Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Review RPJMD 2013-2018.

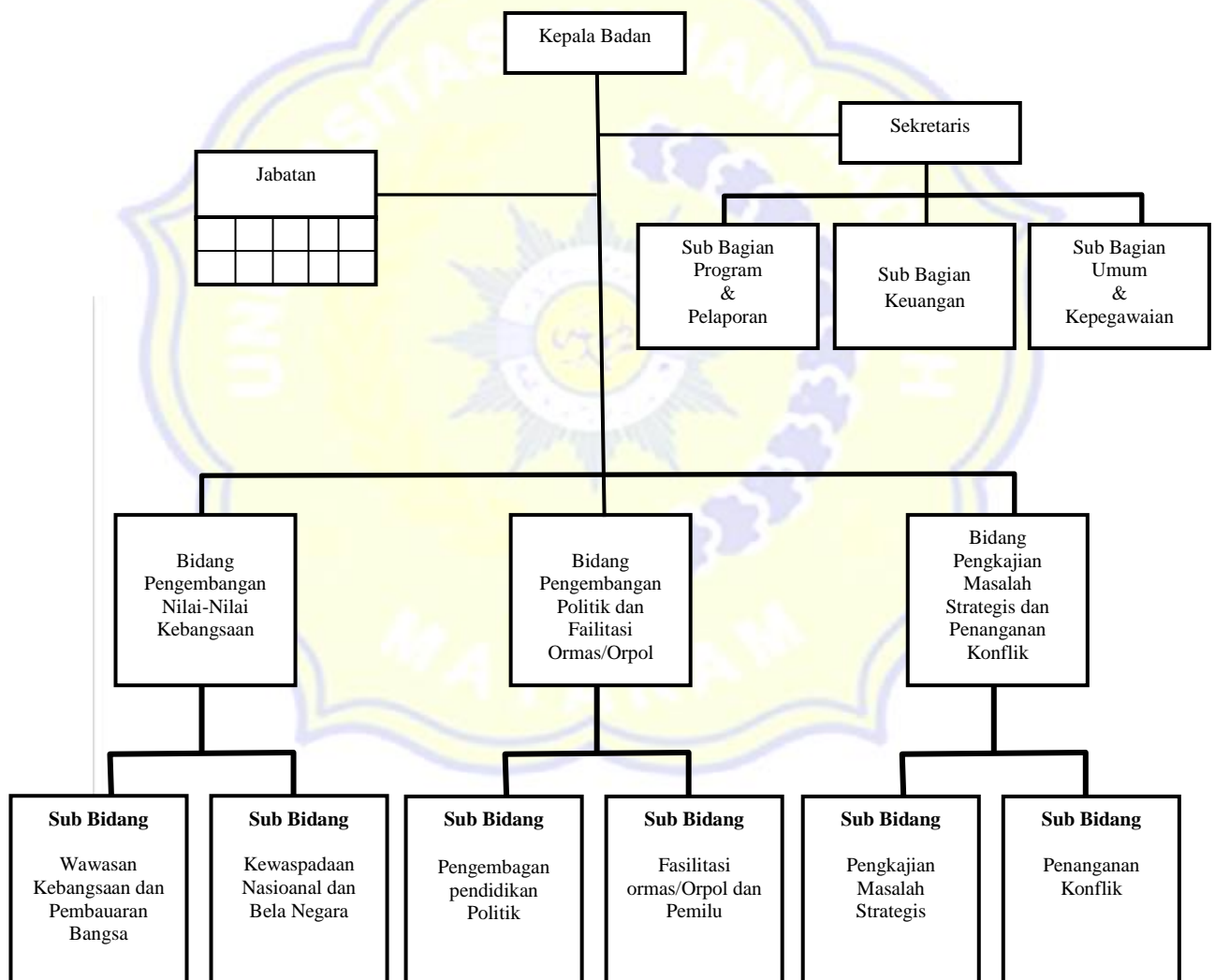
Adapun Tugas Pokok, Fungsi, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sebagai lembaga teknis daerah bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dengan tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bakesbangpoldagri Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, maka struktur organisasi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 seperti pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini Metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri. Selain itu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Objek penelitian yang digunakan adalah “peran Bakesbangpol”.

Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Bersifat alamiah, penelitian kualitatif dilakukan pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan. Hal ini dilakukan karena sifat alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.

- b. Manusia sebagai alat (instrumen), dalam penelitian kualitatif, peneliti tersendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan salah satu sarana pengumpulan data yang utama.
- c. Metode kualitatif, metode yang digunakan yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen,
- d. Lebih mementingkan proses daripada hasil, hal ini disebabkan oleh adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.
- e. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap dan pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memeberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh),

sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Adapun yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah “Peran Bangkesbangpol NTB Dalam Mensukseskan Pemilukada di NTB Tahun 2018”

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpolagri) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini, sumber data primer penulis ialah data langsung yang berasal dari hasil wawancara mendalam (*indept interview*). Data jenis ini akan diperlukan sebagai sumber primer yang memdasari hasil penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. Untuk mendukung penulisan Proposal ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yakni :

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dengan wawancara ini setiap responden diberi pernyataan yang sama, dan pengumpulan data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Observasi sebagai teknik

pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Metode observasi yaitu melakukan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat bagaimana kondisi pendidikan di desa pasir panjang. Hasil observasi ini berupa: aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu dari perasaan emosi seseorang.

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Yaitu observasi yang melibatkan peneliti/pengamatan untuk ambil bagian dalam penelitian. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berebentuk tulisan misalnya catatan harian,

sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Arikunto menyatakan “dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Sementara itu, menurut Tanzeah dokumentasi adalah “mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia”.

Sesuai dengan pendapat tersebut, penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpul data dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, bukan dokumentasi pribadi.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis kualitatif disebut juga teknik analisis data non-statistik yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data-data yang tidak berkaitan langsung dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik *analysis flow model* (model alur). Adapun prosedurnya adalah :

1. *Data collection*, yaitu proses pengumpulan data,
2. *Data editing*, yaitu proses pembersihan data artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah betul.
3. *Data reduction*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan, diatur, dan dibuang yang salah.
4. *Data display*, yaitu penyajian data dalam bentuk *deskriptif verbalitas*.
5. *Data verifikasi*, yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data.
6. *Data konklusi*, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan, baik perumusan secara umum maupun secara khusus.

3.6 Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap pra-lapangan merupakan tahap penjajakan lapangan. Ada lima langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

1. Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini, peneliti membuat usulan penelitian atau proposal penelitian yang sebelumnya didiskusikan dengan dosen pembimbing dan beberapa dosen lain serta mahasiswa. Pembuatan proposal ini berlangsung sekitar satu bulan lebih melalui diskusi yang terus-menerus dengan beberapa dosen dan mahasiswa.

2. Memilih lapangan penelitian

Kantor Bakesbangpoldagri NTB merupakan badan yang melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memfasilitasi terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif hingga memungkinkan seluruh elemen masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya secara baik.

3. Mengurus perizinan

Pada tahap ini yang pertama yaitu mencari tempat penelitian yaitu kantor Bakesbangpoldagri NTB, yang kedua meminta surat pengantar dari fakultas untuk diserahkan kepada pihak lembaga yang berkaitan dan yang ketiga yaitu melakukan penelitian.

4. Menjajak dan menilai lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang peran bakesbangpol dalam mensukseskan pemilu pada di NTB. Agar peneliti lebih siap terjun ke lapangan serta untuk menilai keadaan, situasi,

latar belakang, dan konteksnya sehingga dapat ditemukan dengan apa yang dipikirkan oleh peneliti.

5. Memilih dan memanfaatkan informan

Tahap ini peneliti memilih seorang informan yang merupakan orang yang benar-benar tahu dan terlibat dalam segala aktifitas pemilihan kepala daerah pada tahun 2018. Kemudian memanfaatkan informan tersebut untuk melancarkan penelitian.

6. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu atau kebutuhan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini.

7. Persoalan etika penelitian

Dalam menghadapi persoalan etika tersebut, peneliti mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologis maupun mental. Secara fisik memahami peraturan, norma, nilai sosial masyarakat melalui: kepustakaan, orang, kenalan, teman dari latar belakang dan orientasi latar penelitian. Seluruh peraturan, norma, nilai masyarakat, kebiasaan, kebudayaan dan semacamnya dicatat dalam salah satu buku catatan khusus yang dapat dinamakan buku tentang *Etika Lembaga*.

1. Tahap pekerja lapangan

Dalam tahap ini dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri, selain mempersiapkan diri, peneliti harus memahami latar penelitian agar dapat menentukan model pengumpulan datanya.

b. Memasuki lapangan

Pada saat mudah masuk ke lapangan peneliti menjalin hubungan yang akrab dengan subyek penelitian dengan menggunakan tutur bahasa yang baik, akrab serta bergaul dengan mereka dan tetap menjaga etika pergaulan dan norma-norma yang berlaku di dalam lapangan penelitian tersebut.

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data

Dalam tahap ini peneliti mencatat data yang diperolehnya ke dalam *field notes*, baik data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan atau menyaksikan sendiri kejadian tersebut.

2. Tahap analisis data

Analisis data merupakan tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesa kerja yang sesuai dengan data. Pada tahap ini dibahas prinsip pokok, tetapi tidak akan dirinci bagaimana analisis data itu dilakukan karena ada bab khusus yang mempersoalkannya.